

## Pemanfaatan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Sesuai dengan Tujuan Program SDGs Indonesia 2030

Fandi Rahman Hidayat<sup>1</sup>, Sofia Nur Aisyah<sup>2</sup>, & Felisha Ghassani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Perpustakaan Nasional RI, DKI Jakarta

E-mail: *fandi.rahman30@gmail.com, sofiasyah@gmail.com, felishaghassani@gmail.com*

**Diajukan:** 08-11-2022; **Direview:** 09-11-2022; **Diterima:** 29-12-2022; **Direvisi:** 30-12-2022

### Abstrak

Perpustakaan Nasional RI dalam programnya, Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah program di mana perpustakaan harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial perpustakaan memiliki peran untuk mendukung program UNESCO, yaitu *Sustainable Development Goals* Indonesia 2030 atau disingkat SDGs. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemanfaatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan mengetahui perannya dengan program SDGs khususnya pada tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode fenomenologi dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari kajian ini perpustakaan telah melakukan pemanfaatan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan Tujuan Program SDGs Indonesia 2030.

*Kata kunci: transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial; sustainable development goals indonesia 2030*

### Abstract

*The National Library of Indonesia in its program is Social Inclusion-Based Library Transformation where libraries must be able to improve people's welfare. Library transformation based on social inclusion of libraries has a role to support the UNESCO Sustainable Development Goals Indonesia 2030 program. There are at least 3 objectives of the SDGs program that can be supported by activities carried out by libraries. The aim of the research is to find out the social inclusion-based library transformation, and to find out its role with the SDGs program, especially in the aim of supporting inclusive and sustainable economic growth. The chosen method is phenomenology with a descriptive qualitative approach. The results of this study, the library has utilized the Social Inclusion-Based Library Transformation Program in supporting inclusive and sustainable economic, social and cultural growth in accordance with the 2030 Indonesian SDGs Program Objectives.*

*Keywords: library transformation based on social inclusion; sustainable development goals indonesia 2030*

### Pendahuluan

S. R. Ranganathan (1957) menyatakan tentang *The Five Laws of Library Science*, salah satu hukumnya adalah “*A Library is a growing organism*” perpustakaan akan selalu berkembang. Perpustakaan harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi yang ada. Menurut Khasali (2017) perpustakaan akan menghilang di masa depan bahkan profesi pustakawan tidak lagi dibutuhkan dan tergantikan oleh “*artificial intelligence*”, yaitu mesin-mesin yang hasilnya lebih tepat guna. Namun, melihat perkembangannya saat ini pendapat itu dirasa kurang tepat, karena perpustakaan akan selalu ada dan berkembang selama peradaban manusia ada seperti yang dijelaskan oleh Ranganathan.

Perpustakaan yang ada di Indonesia sedang bertransformasi untuk menjadi pusat berkegiatan bagi masyarakat luas. Program ini dicanangkan oleh Perpustakaan Nasional RI dalam programnya berupa Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang mana perpustakaan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan layanan perpustakaan. Program ini menjadi program prioritas nasional Perpustakaan Nasional RI karena berhasil diaplikasikan pada masyarakat Indonesia yang memiliki keterbatasan dalam mendapatkan informasi. Sampai tahun 2022, perkembangan program ini terus meningkat, dibuktikan dengan dukungan pemerintah daerah dari sisi ekonomi dan hukum. Program transformasi perpustakaan dilakukan oleh beberapa penggerak perpustakaan di negara China, di mana mereka menyelenggarakan berbagai kegiatan perpustakaan berupa layanan inovatif yang berbasis inklusi sosial untuk sekelompok masyarakat yang mengalami pengucilan sosial menurut Zhaochun & Qunqing (2008).

Program *Sustainable Development Goals* atau yang biasa disebut SDGs merupakan program yang diadopsi oleh pemerintah untuk mengawal pembangunan Indonesia secara berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan dan melindungi lingkungan sesuai dengan tujuan dan cita-cita negaranya. Dalam hal ini, perpustakaan ternyata memiliki andil melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang mana di dalamnya adalah sebagian besar ilmu pengetahuan berupa ilmu terapan yang dituangkan ke dalam kegiatan pelatihan. Dikutip dari SDGs Indonesia 2030, setidaknya ada 3 tujuan dari program SDGs yang dapat didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan oleh perpustakaan ini. Tujuan tersebut antara lain, (1) mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk apapun, (2) mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua, dan (3) mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level. Penelitian dilakukan oleh Stillwell (2014) di Afrika Selatan menyebutkan bahwa perpustakaan umum dapat menciptakan modal untuk meningkatkan inklusi sosial melalui layanan perpustakaan yang berpotensi memberikan kontribusi untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Kajian ini membahas sejauh mana pemanfaatan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial oleh masyarakat di berbagai daerah, apakah hasil dan kualitas yang diharapkan sudah sesuai atau belum. Hal ini diangkat karena program ini menjadi salah satu program prioritas nasional yang tentunya perlu tindak lanjut dan perhatian yang lebih, agar keberlanjutan dan pengembangan dari program ini terus ditingkatkan. Selain itu, adanya program pemerintah dalam hal ini adalah SDGs dapat didukung dengan adanya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, khususnya pada tujuan SDGs poin ke delapan yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini masyarakat diharapkan dapat terus mengasah keterampilan dan pengetahuan melalui perpustakaan. Sejalan dengan SDGs Indonesia 2030 perpustakaan dapat menjadi salah satu pendukung keberhasilan pelaksanaan SDGs Indonesia 2030. Hal ini yang menjadikan peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Rumusan masalah yang akan dibahas pada kajian ini adalah: (1) Bagaimana pemanfaatan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial? (2) Bagaimana peran transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan program SDGs dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan? Tujuan penelitian yang dilakukan, yaitu untuk mengetahui pemanfaatan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan untuk mengetahui peran program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan program SDGs dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dikutip dari SDGs Indonesia 2030, program SDGs Indonesia 2030 ini memiliki 17 tujuan dan 163 rencana aksi global untuk 15 tahun kedepan. Diharapkan pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Perlu ada kolaborasi dengan melibatkan berbagai pihak terkait guna mendukung keberhasilan. Perpustakaan termasuk pihak yang dapat ikut terlibat dalam keberhasilan program tersebut. Fokus pembahasan dalam kajian ini adalah tujuan SDGs poin ke delapan, yaitu tujuan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini dapat menjadi rujukan dan langkah awal terkait dengan penelitian dengan lingkup dan cakupan yang lebih besar.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial**

Perpustakaan dapat mengambil bagian dalam mendorong masyarakat menjadi masyarakat yang melek informasi. Masyarakat yang melek informasi diharapkan dapat menggunakan informasi yang dimilikinya untuk suatu kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki banyak penduduk dari berbagai latar belakang, penting sekali bagi perpustakaan untuk bertransformasi memberikan layanan berbasis inklusi sosial. Menurut Utami dan Prasetyo (2019), perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah pendekatan berbasis sistem sosial yang memandang perpustakaan sebagai subsistem sosial dalam sistem kemasyarakatan. Sedangkan menurut penulis, perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan yang memberikan layanan dengan menggunakan pendekatan sosial dan dituntut untuk mampu menunjang kebutuhan informasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka membedakan latar belakang masyarakat tersebut. Menurut Gidley, Wheeler, dan Bereded-Samuel (2010), inklusi sosial dapat berkaitan dengan berbagai bidang pengelompokan sosial. Ini termasuk diferensiasi demografis sehubungan dengan, status sosial-ekonomi, budaya dan bahasa utama, agama; daerah geografis, gender dan orientasi seksual, usia, kesehatan (termasuk cacat fisik dan mental), dan pengangguran. Itu artinya, perpustakaan dituntut untuk dapat fleksibel dalam menjalankan tugasnya melayani berbagai macam masyarakat. Untuk menjadi organisasi inklusif, perpustakaan tidak hanya memenuhi kebutuhan informasi masyarakat tetapi juga kebutuhan informasi masyarakat yang berkembang. Memiliki akses ke sumber informasi terbaru, dilengkapi dengan teknologi baru, perpustakaan dapat mengembangkan penyebaran produk dan layanan inovatif, memastikan aksesibilitasnya ke semua warga, mengantisipasi kebutuhan publik di masa depan dan mempersiapkannya, dan berpartisipasi dalam internasional, nasional, dan proyek antar organisasi (Kulikauskienė & Liukinevičienė, 2020).

Perpustakaan inklusi harus memastikan semua masyarakat dalam berbagai kalangan dapat mengakses layanan perpustakaan. Kaeding J. (2017) mengidentifikasi elemen kunci bagi perpustakaan untuk meningkatkan akses dan inklusi. Elemen kunci tersebut adalah:

1. Koleksi yang disediakan untuk masyarakat harus tersedia dalam berbagai ukuran dan jenis, sesuai dengan masyarakat yang dilayani perpustakaan. Contoh pengembangan koleksi inklusif antara lain; jenis dan subjek koleksi yang ada di perpustakaan, koleksi yang dapat menunjang kebutuhan sehari-hari masyarakat, dan ketersediaan koleksi di perpustakaan akan kebutuhan informasi masyarakat.
2. Hambatan fisik termasuk menciptakan perpustakaan yang dapat diakses, ramah dan nyaman melalui aspek fisik perpustakaan. Hambatan fisik termasuk furnitur yang dapat disesuaikan dengan pengunjung, pencahayaan, dan tingkat kebisingan. Elemen ini juga melibatkan teknologi informasi, termasuk perangkat lunak, perangkat keras, dan akses web.
3. Kemitraan, di mana perpustakaan memiliki peran yang berpengaruh pada kemitraan. Kemitraan dapat membantu perpustakaan memahami kebutuhan pengguna perpustakaan lebih jauh. Jenis kemitraan dapat sangat luas termasuk sekolah, lembaga profesional kesehatan, rumah sakit, galeri seni, museum, swasta, dan lain sebagainya.

4. Program adalah hal yang menantang bagi perpustakaan umum. Hal yang harus diperhatikan dalam elemen ini meliputi: Apa yang membuat program dapat diakses oleh semua orang? Apakah perpustakaan mengembangkan program yang inklusif untuk pengguna dari semua kemampuan? Program seperti apa yang cocok? Siapa yang akan mengembangkan dan menjalankan program?
5. Pelatihan yang akan dibahas terkait bidang lain yang dianggap penting dalam pengembangan perpustakaan inklusif adalah pelatihan staf yang dapat menunjang kegiatan transformasi seperti membuat rencana kegiatan perpustakaan, pengelolaan layanan, negosiasi kepada *stakeholder* dan lain sebagainya.
6. Pemasaran adalah area penting lain dari perpustakaan inklusif. Jenis pemasaran dapat berupa pamflet, situs web, maupun kemitraan.

### ***Sustainable Development Goals (SDGs)***

Dikutip dari SDGs Indonesia 2030, *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau dalam istilah bahasa Indonesia adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Menurut Kementerian PPN/Bappenas, SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya ([sdgs.bappenas.go.id](http://sdgs.bappenas.go.id)). Disahkan pada 25 September 2015 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tujuan ini diikuti oleh 193 kepala negara, termasuk Indonesia yang diwakili oleh Jusuf Kalla.

Tema yang diusung pada SDGs ini adalah “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan” dengan memuat 17 tujuan dan 169 target yang merupakan rencana aksi global untuk menuju Indonesia 15 tahun kedepan (2016-2030). SDGs dirancang secara partisipatif dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, seperti pemerintah, *Civil Society Organization (CSO)*, sektor swasta, akademisi dan pihak terkait lainnya. Mengusung prinsip *Leave No One Behind* SDGs harus dapat menjawab dua hal, yaitu keadilan prosedural yang mana sejauh mana seluruh pihak yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan keadilan substansial sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan para warga negaranya terlebih adalah kelompok yang tertinggal ([sdg2030indonesia.org](http://sdg2030indonesia.org)).

### **Pemanfaatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan Program SDGs**

Menurut peneliti, perpustakaan dapat mendukung program SDGs dalam penyediaan akses informasi, mendorong kemampuan TIK dan literasi warga, dan juga akses ke ruang komunitas. Lebih dari itu, perpustakaan juga harus dapat menilai kebutuhan informasi masyarakat yang datang ke perpustakaan. Pada artikel berjudul *The Changing Role of Libraries: How Social Workers Can Help*, Wahler, Provence, Helling, dan Williams (2019) meneliti staf perpustakaan umum di Amerika Serikat. Penelitian itu menemukan fenomena saat pustakawan diminta untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi terbesar mereka. Staf perpustakaan mengidentifikasi kebutuhan keuangan dan kesehatan mental adalah kebutuhan paling signifikan yang belum terpenuhi. Kedua jawaban ini diikuti oleh kebutuhan perumahan, kesehatan, dan kebutuhan yang berhubungan dengan pekerjaan. Banyak dari pustakawan tersebut berpikir bahwa merupakan tanggung jawab perpustakaan untuk mencoba memenuhi kebutuhan tersebut dalam bentuk memberikan informasi tentang masalah umum yang dialami masyarakat, menawarkan rujukan ke sumber daya tersebut atau bantuan yang mengajukan permohonan manfaat, menyediakan lokakarya tentang kebutuhan psikososial yang umum dialami.

Meskipun ada beberapa pustakawan yang menganggap memenuhi kebutuhan psikososial pengunjung bukanlah peran perpustakaan. Dengan kata lain, keterampilan pekerjaan sosial juga dibutuhkan di perpustakaan umum, dengan tujuan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan informasi masyarakat dan memberikan rujukan informasi.

Transformasi perpustakaan juga sudah dijalankan oleh perpustakaan di Indonesia, salah satunya Perpustakaan Desa Manuk Kabupaten Ponorogo. Bentuk dari transformasi dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelatihan-pelatihan yang diberikan Perpustakaan Desa Manuk antara lain pelatihan membuat keset, menghias keranjang hantaran, dongeng, keterampilan TIK, dan pelatihan las listrik. Hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah adanya peningkatan literasi informasi dan TIK, nilai rapor siswa meningkat, dan peningkatan kesejahteraan warga yang dilihat dari sisi ekonomi dan kesehatan (Wulansari, Sumaryanti, & Syam, 2021). Sementara di Malang, Perpustakaan Desa Gampingan Gemar Membaca menerapkan beberapa strategi dalam transformasi perpustakaan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, memfasilitasi kegiatan masyarakat, advokasi, mentoring dan menyediakan bahan bacaan untuk menambah pengetahuan, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat sekitar, dan membangun rumah edukasi lingkungan (Rachman, Sugiana, & Rohanda, 2019).

Dapat kita simpulkan bahwa peran perpustakaan sangatlah penting dalam mendukung program SDGs. Namun untuk bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial, perpustakaan harus melakukan beberapa pembenahan. Pembenahan tersebut dapat berupa pengembangan perpustakaan agar lebih mudah diakses, pelatihan SDM, dan menyediakan koleksi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

### Metode Penelitian

Metode yang dipilih dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif, di mana metode ini tidak dapat diukur menggunakan angka. Data yang dihasilkan dari kualitatif deskriptif adalah data yang berupa kata-kata, gambar dan bukan data yang berupa angka (Moleong, 2007). Data hasil penelitian akan dijelaskan dalam bentuk narasi atau paparan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan, yaitu dari hasil observasi atau wawancara. Hasil pengumpulan data di lapangan akan dikaitkan dengan teori yang berkaitan.

Pendekatan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui peran transformasi perpustakaan dalam mendukung program SDGs. Pendekatan fenomenologi lebih berfokus pada penjelasan dan pengalaman atau proses yang pernah terjadi pada kehidupan seseorang. Menurut Riyanto dalam Farid (2018: 26) fenomenologi adalah sebuah metodologi untuk mencapai kebenaran. Dengan menggunakan pendekatan ini hasil penelitian akan berupa penjelasan rinci dari subjek, yaitu penerima manfaat transformasi perpustakaan tentang pengalaman mereka setelah mendapatkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara melibatkan penerima manfaat transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan PIC program. Wawancara bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran transformasi perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup penerima manfaat. Penarikan sampel informan ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu dengan menggunakan kriteria pada informan, yaitu penerima manfaat. Penerima manfaat tersebut memiliki kriteria sebagai berikut: penerima manfaat yang baru pada tahun 2022 dan penerima manfaat yang berada di daerah sekitar tempat para peneliti.

Selain penerima manfaat, sampel informan adalah PIC program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dari Dinas Perpustakaan Kabupaten dan Kota yang menjadi sampel penelitian

yaitu, Kota Jakarta Timur, Kota Depok, dan Kabupaten Purwakarta. Ini karena PIC dari dinas menjadi pendamping dalam keberhasilan program. Dinas perpustakaan adalah pihak paling tahu kondisi keadaan lapangan sebenarnya dan dinas perpustakaan nanti akan terus mengawal program sampai berhasil tentunya sampai tingkat yang paling rendah, yaitu perpustakaan desa atau penerima manfaat.

Data diolah dengan cara menganalisis hasil wawancara dan dikategorikan sesuai dengan pedoman wawancara yang sudah dibuat sebelumnya, dalam hal ini pengklasifikasian data sesuai dengan kriteria sampel yang telah ditentukan. Data yang telah dihasilkan kemudian dianalisis lebih lanjut dengan mengacu pada studi pustaka atau penelitian terdahulu dengan topik yang sesuai dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2022, 14 September 2022 dan 16 September 2022. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dan observasi sebagai instrumen penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

### Pemanfaatan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Peneliti mewawancarai *Person in Charge* (PIC) tiap lokus. Peneliti melakukan pembahasan terhadap hasil wawancara dan observasi. Wawancara dan observasi dilakukan untuk wilayah Suku Dinas Jakarta Timur, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Depok untuk mengetahui pemanfaatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Instrumen penelitian yang digunakan sebagian besar adalah terkait dengan layanan perpustakaan yang diberikan, dari mulai sarana dan prasarana penunjang program, koleksi perpustakaan penunjang program kegiatan, program dan inovasi program apa saja yang diberikan untuk mendukung program TPBIS, pemasaran program TPBIS dan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mensukseskan program TPBIS kedepannya. Hasil dari instrumen tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

### Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Sarana prasarana perpustakaan di Suku Dinas Jakarta Timur seperti fasilitas komputer, wifi, serta sarpras lainnya yang menunjang dalam kegiatan workshop masih belum memadai dan terbatas. Hal ini dapat terlihat dari PIC perpustakaan tersebut yang mengatakan “untuk mendukung TPBIS menurut kami belum mumpuni karena belum ada sarana prasarana seperti komputer dan peralatan workshopnya, jaringan *wifi*-nya masih minim karena dengan kondisi saat ini masih *hybrid* ada via zoom dan ada pula *offline*”. Untuk Kota Depok, fasilitas yang disediakan sudah cukup untuk melaksanakan kegiatan dengan baik dan banyak juga masyarakat berkegiatan di perpustakaan. PIC perpustakaan umum Kota Depok menyatakan bahwa “sudah, misalnya mau ada program perpustakaan untuk 100 orang kita siap banget untuk tempat, tinggal milih kok. Masyarakat sering kegiatan di sini, misalnya mau ada sosialisasi tentang apa sampai pengajian juga di sana.” Sementara Kabupaten Purwakarta, dapat dikatakan cukup, dapat pula dikatakan tidak mengingat banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Masyarakat yang datang ke Perpustakaan Kabupaten Purwakarta sudah banyak. Penjabaran di atas menunjukkan bahwa ke tiga perpustakaan di atas sesuai dengan teori Utami dan Presetyo (2019) yang menyatakan bahwa perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah pendekatan berbasis sistem sosial yang memandang perpustakaan sebagai subsistem sosial dalam sistem kemasyarakatan.

### Koleksi Perpustakaan

Ketiga daerah, yaitu Suku Dinas Jakarta Timur, Kota Depok, dan Kabupaten Purwakarta memiliki koleksi yang lengkap dan dapat menunjang kegiatan TPBIS dengan baik melalui koleksi-koleksi yang mereka miliki. Ketiga daerah sudah melihat koleksi sebagai sarana utama yang penting bagi pelaksanaan dasar perpustakaan berjalan dengan baik. Koleksi yang disajikan oleh perpustakaan baiknya dapat menjadi sumber primer pengetahuan yang diaplikasikan pada kegiatan di masyarakat untuk program TPBIS. Sebagai contoh, PIC Perpustakaan Suku Dinas Jakarta Timur menyatakan bahwa “untuk koleksi lengkap ya, lengkap itu bisa ada materi yang direalisasikan ke dalam bentuk

kegiatan TPBIS seperti kerajinan, pelatihan bahasa Inggris atau bahasa Korea.” Di dua perpustakaan lain, buku dijadikan sebagai dasar landasan teori dan dihadirkan pula narasumber yang ahli, serta mempraktikkan ilmu yang didapatkan dari buku yang ada itu menjadi nyata. Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan sudah memenuhi elemen kunci perpustakaan inklusi, yaitu jenis dan subjek koleksi yang ada di perpustakaan menyediakan koleksi yang dapat menunjang kebutuhan sehari-hari masyarakat dan ketersediaan koleksi di perpustakaan akan kebutuhan informasi masyarakat (Kaeding, 2017).

### **Program TPBIS**

Kaeding (2017) menyatakan bahwa program pada perpustakaan inklusi harus memperhatikan beberapa aspek seperti: Apa yang membuat program dapat diakses oleh semua orang? Apakah perpustakaan mengembangkan program yang inklusif untuk pengguna dari semua kemampuan? Program seperti apa yang cocok? Siapa yang akan mengembangkan dan menjalankan program? Hal ini bertujuan agar program tepat sasaran, bermanfaat bagi masyarakat, dan terencana dengan baik. Hal ini sesuai dengan keadaan di masing-masing lokus penelitian. Sebagai contoh, Perpustakaan Umum Kabupaten Purwakarta menyatakan bahwa “kalau untuk kegiatan terkait dengan pelibatan masyarakat banyak sih sebenarnya kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan ... itu rutin pertemuannya sebulan sekali. Kalau yang kelas-kelas lain sih mungkin bukan kelas ya, kegiatan-kegiatan pelibatan masyarakat yang lain sifatnya tidak kontinu.” Perpustakaan Suku Dinas Jakarta Timur memberikan pelatihan tentang mengelola limbah sampah plastik. Mereka juga memiliki koleksi mengenai anggrek yang mendukung mereka dalam program kampung sejuta anggrek yang ada di Kecamatan Pasar Rebo. Buku-buku mengenai tanaman anggrek didukung dari pihak Suku Dinas Perpustakaan Jakarta Timur. Kota Depok mengadakan kegiatan seperti, lomba perpustakaan, duta baca, lomba mendongeng dan lomba menulis. Di sisi lain, kegiatan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan sudah lebih banyak lagi, seperti kelas merajut, kelas menulis, kelas Bahasa Inggris yang dilaksanakan untuk tingkat SD-SMP-SMA, selain itu terdapat juga program kelas Bahasa Korea, dan juga banyak program lain yang bersifat tidak kontinuitas. Kabupaten Purwakarta melakukan banyak kerja sama yang ada dengan *stakeholder* yang ada di daerahnya seperti Rumah Kreatif BUMN. Program yang dimiliki Perpustakaan Kabupaten Purwakarta dilihat sudah cukup kuat dalam membangun masyarakat melalui kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan terlihat dampaknya bagi masyarakat sehingga masyarakat sangat antusias.

### **Pemasaran Program TPBIS**

Pemasaran adalah area penting lain dari perpustakaan inklusif. Jenis pemasaran dapat berupa pamflet, situs web, maupun kemitraan (Kaeding, 2019). Dari wawancara, semua PIC program TPBIS masing-masing lokus menyatakan bahwa mereka memasarkan program yang mereka buat. Hal ini guna menarik minat masyarakat untuk mengikuti program yang dilaksanakan. Di sini program TPBIS menjadi salah satu produk yang dihadirkan oleh perpustakaan kepada masyarakat luas untuk dapat diikuti dan diambil manfaatnya. Pemasaran dilakukan oleh perpustakaan untuk mengembangkan program TPBIS, untuk Suku Dinas Perpustakaan Jakarta Timur promosi dilakukan melalui ibu-ibu PKK yang ada dari grup mereka itu. Kemudian, peserta akan datang ke kegiatan dan juga melalui sosial media pegawai. Untuk Kota Depok promosi kegiatan dilakukan melalui sosial media perpustakaan, didukung oleh pustakawan yang ada dapat menjadi kekuatan dalam promosi melalui sosial media. Kabupaten Purwakarta pun menggunakan sosial media sebagai sarana promosi kegiatan yang ada karena dapat mencakup berbagai kalangan.

Di sini dapat kita simpulkan bahwa sosial media memiliki peran yang sangat baik dalam membantu promosi kegiatan yang dimiliki oleh perpustakaan dalam menunjang kegiatan TPBIS pada daerahnya masing-masing. Setelah itu, peneliti lanjut kepada pertanyaan selanjutnya mengenai media apa yang paling efektif untuk digunakan oleh perpustakaan dalam proses pemasaran program yang

mereka miliki. Terkait dengan pemasaran tentunya terdapat dampak dari pemasaran yang telah dilakukan oleh perpustakaan terkait program-program yang mereka miliki. Dari hasil wawancara ketiga lokus penelitian setuju bahwasanya pemasaran program yang diadakan membuat jumlah peserta menjadi banyak. Hal ini diharapkan dapat menjadikan semakin banyak masyarakat yang tercakup ikut dalam program dalam mensejahterakan kehidupan mereka. Dapat kita simpulkan promosi dan pemasaran dari kegiatan perpustakaan harus tetap masif untuk dilaksanakan.

### **Kerja Sama dalam Program TPBIS**

Suku Dinas Perpustakaan Jakarta Timur belum melakukan kerja sama karena belum adanya dasar hukum yang dapat dijadikan dasar. Sedangkan, dua daerah lainnya seperti Kota Depok dan Purwakarta aktif dalam membangun kolaborasi dan kerja sama dalam rangka menyukseskan TPBIS. TPBIS tidak dapat berjalan sendiri dan sebaiknya harus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak agar program benar-benar memberi manfaat dan dampak yang besar untuk masyarakat luas.

Selanjutnya, peneliti menanyakan mengenai program kemitraan yang dimiliki oleh tiap lokus. Suku Dinas Jakarta Timur baru akan melakukan program kemitraan kedepannya nanti. Kota Depok melakukan kolaborasi dengan pelaku usaha kerajinan yang dijadikan daur ulang untuk *win-win solution*. PIC Perpustakaan Umum Kabupaten Purwakarta mengungkapkan “bekerja sama dengan penerbit, kemudian dengan OPD jelas ya, kita selalu meminta dukungan mereka untuk mensosialisasikan program kita misalnya kalau ke dinas pemberdayaan masyarakat desa, kita kan untuk mereplikasi kegiatan TPBIS kita di perpustakaan desa juga untuk mendapat dukungan dari mereka.”

Sementara Perpustakaan Kota Depok sudah berkolaborasi dengan pihak terkait dari beberapa program yang sudah dilakukan seperti yang terlihat dari hasil wawancara yaitu “kami ini memang berkolaborasi ya, contoh kegiatan bedah buku saya cuma dapat anggaran yang terbatas tapi kan saya butuh iklan, butuh spanduk, butuh konsumsi. Nah kami itu berkolaborasi dengan dinas pariwisata gitu.” Sama halnya dengan Kabupaten Purwakarta yang sudah melakukan program kemitraan jauh sebelum program TPBIS diadakan, salah satunya adalah dengan penerbit-penerbit lokal yang ada. Kota Depok dan Kabupaten Purwakarta sepakat pengaruh yang diberikan dari mitra kepada program ini sangat besar. Menurut Perpustakaan Kota Depok dan Kabupaten Purwakarta, banyak sekali dampak baik yang dihasilkan dalam menjalin kemitraan. Kemitraan yang baik memberikan dampak yang baik dan menguntungkan bagi kedua belah pihak yang menjalankan kemitraan dan kerja sama.

Dari pemaparan instrumen di atas dapat diketahui bahwa untuk pemanfaatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, perpustakaan perlu melibatkan beberapa aspek agar program dapat berjalan dengan baik. Jika dilihat dari hasil wawancara dengan PIC program beberapa perpustakaan terus menjalankan program dengan baik dengan memanfaatkan sarana, prasarana, koleksi, maupun sumber daya manusia yang dimiliki. Dengan memaksimalkan pelaksanaan program TPBIS dan dukungan dari pihak terkait juga terus ikut serta dalam menyukseskan keberlangsungan program, agar program ini dapat terus berjalan dan dapat memberikan dampak bagi masyarakat. Namun, belum semua perpustakaan dapat menyediakan dan menjalankan program yang variatif dan berkelanjutan. Hal ini terjadi mengingat beberapa perpustakaan baru memulai program TPBIS dan masih kurangnya dukungan dari beberapa pihak terkait. Penjabaran di atas sesuai dengan teori Kaeding (2017) yang mengungkapkan bahwa kemitraan dapat membantu perpustakaan memahami kebutuhan pengguna perpustakaan lebih jauh. Jenis kemitraan dapat sangat luas termasuk sekolah, lembaga profesional kesehatan, rumah sakit, galeri seni, museum, swasta dan lain sebagainya.

## Peran Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dengan Program SDGs dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Untuk menjawab rumusan masalah ini, peneliti mewawancari masyarakat penerima manfaat sebagai informan dari tiap lokus. Pada penelitian ini, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dilihat dari sisi koleksi, hambatan fisik, program, pelatihan, dan pemasaran.

### Koleksi

Transformasi adalah perubahan terhadap suatu hal atau keadaan. Artinya, koleksi yang disediakan perpustakaan yang memiliki program TPBIS harus dapat mendorong perubahan yang dirasakan masyarakat. Dari hasil wawancara dengan penerima manfaat diketahui bahwa perpustakaan menyediakan koleksi yang sesuai kebutuhan sehari-hari masyarakat, terutama terkait dengan pelatihan keterampilan.

Kemudian selain koleksi yang dapat menunjang kegiatan sehari-hari, koleksi terkait dengan pelatihan *soft skills* yang dapat menambah pemasukan juga tersedia. Menurut pendapat beberapa informan terlihat bahwa memang sebagian besar informan pernah mencari koleksi dengan tujuan untuk mencari pemasukan dan untuk mencari rujukan setelah mendapatkan pelatihan, agar dapat memperdalam ilmu tambahan. Salah satu informan mengungkapkan “Koleksi di perpustakaan depok alhamdulillah bagus, semuanya ada di situ. Komplit.” Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan informasi mereka.

Selain itu juga terdapat informan yang belum pernah sama sekali ke perpustakaan tetapi informan tersebut mempunyai keinginan untuk mencari referensi lebih lengkap tentang keterampilan khususnya, hal tersebut dilakukan untuk memperkaya pengetahuan dalam mengasah keterampilannya. Pada wawancara informan mengungkapkan bahwa buku yang disediakan perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan informasi mereka. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa transformasi yang dilakukan perpustakaan pada koleksi adalah dengan menyediakan buku yang dibutuhkan masyarakat. Perpustakaan juga memastikan ketersediaan buku yang sesuai dengan tema pelatihan, sehingga masyarakat dapat belajar mandiri setelah selesai mendapatkan pelatihan. Hal ini berperan penting dalam kesiapan masyarakat untuk menambah pengetahuan, sehingga pengetahuan tersebut dapat menguntungkan kehidupan mereka, di sini telah terlihat kesesuaian yang ada.

### Hambatan Fisik

Menurut Kaeding J. (2017) perpustakaan berbasis inklusi sosial memiliki elemen lain, yaitu hambatan fisik. Hambatan fisik terkait dengan akses perpustakaan, teknologi dan informasi yang tersedia, serta sarana dan prasarana yang disediakan oleh perpustakaan. Terkait akses, sebagian besar lokasi perpustakaan memang berada di pusat kota dan mudah diakses masyarakat namun tidak semua masyarakat memiliki akses menuju perpustakaan yang mudah dan cepat.

Dilihat dari pendapat informan dengan kendala yang dihadapi untuk datang ke perpustakaan, hal ini terlihat seimbang. Salah satu informan mengungkapkan “Jauh saya di Cinangka, sudah macet jauh. Akses jauh. Kendaraan umum susah juga dari rumah. Rumah saya di kelurahan Cinangka”, sementara informan lain tidak memiliki kendala untuk datang ke perpustakaan. Sebagian besar menyatakan bahwa untuk datang ke perpustakaan tidak ada kendala apapun, dan mendorong informan aktif dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh perpustakaan. Namun tidak semua informan menyatakan tidak ada kendala yang dihadapi ketika datang ke perpustakaan. Terdapat salah satu informan yang menyatakan bahwa informan tersebut terkendala dengan jarak yang jauh dan macet untuk datang ke perpustakaan.

Hambatan fisik lainnya adalah terkait dengan gedung beserta sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan yang menunjang masyarakat dalam mengakses informasi di perpustakaan. Sarana dan

prasarana ini juga berkaitan dengan teknologi dan informasi yang disediakan oleh perpustakaan. Menurut pendapat para informan terkait dengan gedung, sarana dan prasarana perpustakaan yang tersedia sudah memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Gedung perpustakaan dirasa nyaman dan tata ruang yang memadai membuat masyarakat nyaman untuk berada di perpustakaan. Sarana dan prasarana yang disediakan juga sudah memadai, seperti ketersediaan komputer dan internet. Perpustakaan sudah menyediakan hal tersebut untuk terus mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan mengakses informasi.

Kemudian kenyamanan masyarakat dalam menggunakan sarana dan prasarana juga perlu diperhatikan, seperti kesesuaian meja dan kursi baca, rak koleksi yang ergonomis sampai dengan pencahayaan dan keadaan seluruh sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan. Dari hasil wawancara, seluruh informan berpendapat bahwa seluruh sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan nyaman digunakan dan sangat menunjang kebutuhan masyarakat akan mengakses informasi yang dibutuhkan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan telah berusaha meminimalisir hambatan fisik terutama pada sarana dan prasarana, serta teknologi dan informasi yang dimiliki oleh perpustakaan. Upaya transformasi ini bertujuan untuk menambah daya tarik masyarakat terhadap perpustakaan. Tidak hanya itu, tentunya perpustakaan telah memperhatikan kenyamanan masyarakat selama menggunakan fasilitas di perpustakaan. Ini membuktikan perpustakaan telah membuat beberapa inovasi yang ditawarkan oleh perpustakaan.

### **Program**

Perpustakaan telah menunjukkan transformasinya melalui program TPBIS dengan melakukan berbagai kegiatan pelatihan yang diadakan. Menurut Kaeding (2017) banyak hal yang harus diperhatikan dari program seperti target program, kegiatan program, dan penanggung jawab. Terkait dengan program TPBIS, para informan mengetahui bahwa program ini merupakan kegiatan pelatihan yang diadakan oleh perpustakaan. Di lain sisi, para informan belum mengetahui secara jelas keberlanjutan program namun lewat program TPBIS masyarakat menjadi mengetahui keberadaan perpustakaan. Program TPBIS menjadi peluang bagi perpustakaan untuk melebarkan promosinya kepada masyarakat, agar masyarakat dapat lebih memanfaatkan perpustakaan. Seperti yang disampaikan salah satu informan dari Perpustakaan Umum Kabupaten Purwakarta, “Perpustakaan membawa perubahan bagi masyarakat sekitarnya ya bagi masyarakat umumnya sehingga kalo dari awal diberi keterampilan itu kita bisa mengembangkan dari mulanya cuma iseng-iseng jadi bisa kalau yang rajin yang konsisten dan ulet kan bisa menghasilkan uang juga”.

Biasanya waktu pelaksanaan program ini berbeda-beda di setiap daerah. Jumlah pertemuan dan durasi penyelenggaraan program dapat mempengaruhi keahlian peserta pada materi yang disampaikan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa perpustakaan penerima manfaat baru satu kali menyelenggarakan pelatihan. Di lain sisi, perpustakaan penerima manfaat percontohan memberikan pelatihan lebih dari satu kali. Pelatihan ini bersifat rangkaian pelatihan, yang berarti ada lebih dari satu pertemuan sehingga peserta pelatihan akan mendapatkan ilmu dan keterampilan lebih banyak dibanding peserta yang hanya mendapat satu kali pelatihan. Selain itu, perpustakaan penerima manfaat percontohan juga telah menyelenggarakan banyak jenis pelatihan seperti pelatihan bahasa, merajut, meramu obat herbal, dan menulis.

Semua informan mengakui pelatihan yang diberikan bermanfaat. Selain itu, mereka menyadari keterampilan dan pengetahuan mereka lebih diasah, akan berpeluang meningkatkan ekonomi. Di lain sisi, informan penerima manfaat percontohan merasakan manfaat yang lebih banyak. Selain menambah penghasilan, keterampilan dan pengetahuan yang didapatkan dari pelatihan tersebut digunakan untuk membantu orang-orang di sekitar mereka. Salah satu informan juga mengatakan bahwa pelatihan tersebut memberikan relasi baru terhadapnya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa program

TPBIS memberikan banyak manfaat dari segi ekonomi dan segi sosial. Namun dalam wawancara, peneliti ingin mengetahui apakah program tersebut berpengaruh terhadap pendapatan informan. Pada pertanyaan ini, informan memiliki jawaban berbeda. Informan penerima manfaat baru belum merasakan perbedaan pendapatan mereka walau mereka menyadari hal tersebut dapat dimanfaatkan di masa depan. Sementara penerima manfaat percontohan, tidak fokus menambah penghasilan untuk pribadi. Melainkan, para informan memanfaatkan hasil pelatihan untuk kegiatan instansi tempat mereka bekerja.

Dengan adanya program TPBIS ini menunjukkan adanya pengembangan peran perpustakaan, semula perpustakaan hanya menyediakan buku namun sekarang perpustakaan telah melebarkan sayapnya dengan mengadakan kegiatan di perpustakaan yang melibatkan masyarakat. Selain itu, masyarakat pun mempunyai minat untuk datang ke perpustakaan dalam mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan oleh perpustakaan. Kegiatan yang diadakan pun tidak berhenti di situ saja, namun masyarakat mempelajari lebih jauh materi pelatihan dengan mempelajari dari koleksi yang disediakan oleh perpustakaan.

### **Pelatihan**

Pelatihan kepada pustakawan dapat berupa pelatihan pelayanan, termasuk berkomunikasi dengan pemustaka. Informan mengungkapkan bahwa semua perpustakaan penerima manfaat membantu pemustaka dalam menggunakan layanan perpustakaan. Hal ini dapat membuat pemustaka merasa nyaman dalam memanfaatkan layanan perpustakaan. Bahkan salah satu informan penerima manfaat baru mengungkapkan bahwa ia merasa terbantu sejak baru masuk ke lingkungan perpustakaan, hal ini terwujud saat satpam sudah menanyakan kebutuhan informan saat tiba di perpustakaan. Sedangkan penerima manfaat percontohan mengungkapkan bahwa adanya relasi yang kuat antara dirinya dan pihak perpustakaan. Relasi seperti ini didasari oleh kemampuan komunikasi yang baik dan dapat membuat pemustaka merasa terikat dengan perpustakaan tanpa paksaan. Dengan kata lain, perpustakaan penerima manfaat baru dan percontohan berperan aktif dalam membantu pemustaka dalam pencarian informasi.

Hal ini dilanjutkan dengan pertanyaan peneliti mengenai komunikasi antara pustakawan dengan pemustaka. Pada wawancara, informan mengungkapkan bahwa pustakawan sangat komunikatif dan ramah serta tidak membedakan antar pemustaka. Hal ini terlihat dari informan Perpustakaan Umum Kabupaten Purwakarta yang mengungkapkan bahwa “Iya, udah pasti dong kalau ga komunikatif kita kesulitan mau minta informasi apa juga. Walaupun kita ga bisa datang ke sini kita butuh apa, kita bisa *chat* juga”. Sedangkan informan Perpustakaan Umum Kota Depok mengungkapkan “komunikasinya sih lumayan lancar ya, maksudnya tuh gampang berkomunikasi gitu ga ada beda bedanya ke pengunjung satu sama yang lain”. Dari penjabaran di atas, terlihat bahwa perpustakaan penerima manfaat baru dan percontohan telah terlatih dalam mengelola layanan perpustakaan. Hal itu diwujudkan dengan keramahan pada pemustaka, komunikasi yang baik, serta sikap membantu pemustaka dalam pencarian koleksi dan pemanfaatan layanan perpustakaan.

Kaeding (2017) mengungkapkan bahwa pelatihan staf yang dapat menunjang kegiatan transformasi adalah hal yang penting, seperti pengelolaan layanan. Semua staf mengambil andil dalam membantu pemustaka dengan menggunakan komunikasi yang baik sehingga tercipta kondisi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang harmonis. Lingkungan ini dapat menarik pemustaka untuk datang ke perpustakaan dengan nyaman tanpa membedakan latar belakang pemustaka.

### **Pemasaran**

Pemasaran yang baik dapat meningkatkan permintaan dari pembeli. Dari semua pernyataan di atas, diketahui bahwa pihak-pihak terkait membantu pemustaka sebagai peserta pelatihan untuk memasarkan produk mereka untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Ini menunjukkan bahwa pemberian materi pelatihan diharapkan dapat menambah pendapatan pemustaka. Karena itu, peneliti

mewawancarai apakah informan pernah memasarkan produk mereka. Semua informan sudah pernah memasarkan produk mereka. Informan dari perpustakaan penerima manfaat percontohan sudah memasarkan produk mereka untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Semua informan menggunakan sosial media untuk memasarkan produk mereka. Penggunaan sosial media untuk memasarkan produk bukan hal yang baru mengingat hampir semua orang menggunakan sosial media dan mudah untuk digunakan. Namun belum semua informan penerima pelatihan dari perpustakaan penerima manfaat baru memasarkan produk mereka. Hal ini karena informan penerima manfaat baru belum yakin untuk menjual produk mereka karena merasa belum ahli di bidang tersebut. Namun semua promosi yang dilakukan semua informan mendapatkan respon dari masyarakat, yang menandakan adanya peluang bagi informan untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Untuk itu, peneliti hanya menanyakan pertanyaan dampak pemasaran produk.

Pemasaran dapat menambah jumlah pesanan pada produk yang mereka hasilkan. Namun pesanan yang bertambah tidak diikuti dengan penambahan tenaga bagi informan penerima manfaat percontohan. Sementara informan penerima manfaat baru mengaku bahwa ia kekurangan modal dan membutuhkan pelatihan tambahan. Sementara informan penerima manfaat percontohan lain merasakan bahwa produk yang ia hasilkan dan diaplikasikan di sekolah tempatnya bekerja, membuat tempatnya bekerja menjadi semakin dikenal. Sementara itu, informan lain mengatakan bahwa belum ada manfaat yang ia rasakan karena belum memulai menjual produk yang sudah ia pelajari.

### **Perubahan dan Harapan Program TPBIS**

Pada pembahasan di atas, diketahui bahwa pemustaka dari perpustakaan penerima manfaat percontohan sudah beberapa kali mengikuti layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial berupa pelatihan di perpustakaan. Di lain sisi, pemustaka dari perpustakaan penerima manfaat sejauh ini baru mendapatkan satu kali pelatihan. Semua informan menyatakan pendapat yang sama bahwa pelatihan yang didapatkan dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial bermanfaat bagi mereka. Hal utama yang terasa adalah peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Saat ini informan penerima manfaat baru belum mengaplikasikan manfaat tersebut ke langkah yang lebih jauh, mengingat para informan baru satu kali mendapatkan pelatihan. Sementara ini informan penerima manfaat percontohan sudah menerapkan keterampilan pada keseharian mereka. Keterampilan tersebut mereka aplikasikan dengan cara mengajarkan ke orang lain dan menjual produk untuk mendapatkan pendapatan tambahan.

Setelah merasakan manfaat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di kehidupan sehari-hari, mendorong pemustaka memiliki rencana masa depan terkait hal tersebut. Untuk itu, dalam wawancara peneliti menanyakan harapan dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam menunjang kehidupan sehari-hari informan. Dari pernyataan di atas terlihat bahwa pemustaka penerima manfaat percontohan lebih menginginkan pelatihan tersebut dapat dijangkau oleh banyak orang sehingga makin banyak orang yang mendapatkan manfaat. Sedangkan pemustaka penerima manfaat baru mengharapkan pelatihan selanjutnya agar mendapatkan keterampilan yang lebih mendalam dan keterampilan di bidang lain.

Pernyataan-pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial mendukung SDGs dengan membantu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan perpustakaan membantu pemasaran produk, dan bagaimana penerima manfaat mengambil manfaat dari keahlian mereka. Bahkan manfaat yang mereka dapatkan tidak hanya penambahan pemasukan, namun juga dalam bidang sosial dan budaya.

### Program TPBIS dalam Mendukung SDGs Indonesia 2030

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti program TPBIS nantinya akan dapat mendukung SDGs Indonesia 2030, lebih khususnya pada tujuan ke delapan terkait dengan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua dilihat dari beberapa pendapat informan, yaitu informan pertama menyampaikan “kalo kemarin masalahnya jatohnya keterampilan ya sekaligus jatohnya ke seni juga, ke ekonomi juga ya sebenarnya”. Informan selanjutnya menyampaikan “menambah ekonomi keluarga kalau diterusin”.

Ini dapat terlihat bahwa beberapa informan berpendapat program ini dapat menambah perekonomian masyarakat. Ini sesuai target yang terdapat pada tujuan kedelapan SDGs Indonesia 2030, yaitu mencapai level yang lebih tinggi untuk produktivitas ekonomi melalui disertifikasi, peningkatan mutu teknologi dan inovasi, termasuk melalui fokus terhadap sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah lebih dan padat karya, serta dapat mendorong kebijakan yang berorientasi pembangunan yang mendukung aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan. Dalam hal tersebut masyarakat dapat mengali program pelatihan yang diberikan perpustakaan. Perlunya pengembangan lebih jauh, seperti pelatihan pemasaran, *digital marketing*, pemasaran kreatif dan perlu dilakukan perpustakaan untuk melatih masyarakat memasarkan produk, dan menjadi dukungan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang secara inklusif dapat terlaksana.

### Kesimpulan

Perpustakaan telah melakukan pemanfaatan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan program SDGs Indonesia 2030. Dibuktikan dengan perpustakaan melakukan berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan ekonomi, kegiatan sosial, budaya dan aktivitas-aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan tujuan nomor kedelapan SDGs Indonesia 2030, khususnya pada poin ketiga. Penerima manfaat merasakan penambahan keterampilan dan pengetahuan. Mereka menyadari bahwa keterampilan dan pengetahuan mereka diasah, akan berpeluang meningkatkan ekonomi. Selain menambah penghasilan, keterampilan dan pengetahuan yang didapatkan dari pelatihan tersebut digunakan untuk masyarakat sekitar. Selain itu, program sudah berjalan sesuai dengan porsinya namun masyarakat menginginkan adanya keberlanjutan program yang diberikan oleh pihak perpustakaan agar mereka bisa belajar lebih.

Perpustakaan penerima manfaat telah terlatih dalam mengelola layanan perpustakaan. Itu diwujudkan dengan keramahan pemustaka, komunikasi yang baik, sikap membantu dalam pencarian koleksi dan pemanfaatan perpustakaan. Perpustakaan sudah melakukan kolaborasi walau ada yang belum. Pihak terkait yang dimaksud adalah staf, pengisi materi atau pengajar, dan mitra yang bekerjasama dengan perpustakaan membantu pemustaka sebagai peserta pelatihan untuk memasarkan produk. Masyarakat mendukung adanya program TPBIS secara berkelanjutan, terlihat antusias mengikuti kegiatan yang ada dan mereka terus mengikuti program. Semua lokus memiliki kesamaan program dilakukan dengan tujuan untuk pengembangan bidang ekonomi, dan tanpa disadari program yang dihasilkan juga telah mengembangkan nilai di berbagai bidang. Perpustakaan yang baik harus membantu masyarakatnya menjadi sejahtera. Sejahtera bukan hanya di sektor perekonomian saja tetapi juga termasuk dalam sektor sosial budaya yang ada dan aktivitas produktif. Penelitian ini belum menggambarkan program secara keseluruhan di Indonesia, namun dapat menjadi rujukan awal program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dalam hal evaluasi kebermanfaatan program.

## Daftar Pustaka

- Farid, M. (2018). *Fenomenologi dalam penelitian ilmu sosial*. Kencana
- Gidley, J., Hampson, G.P., Wheeler, L., & Bered-Samuel, E. (2010). Social inclusion: context, theory and practice. *The Australasian Journal of University Community Engagement*, 5(1), 6–36. <https://researchrepository.rmit.edu.au/esploro/outputs/journalArticle/Social-inclusion-Context-theory-and-practice/9921857731901341/filesAndLinks?index=0>
- Kaeding, J., Velasquez, D. L., & Price, Deborah. (2017). Public libraries and access for children with disabilities and their families: a proposed inclusive library model. *Journal of the Australian Library and Information Association*, 66(2), 96-115. <https://doi.org/10.1080/24750158.2017.1298399>
- Kementerian PPN/BAPPENAS. (2016). *Sekilas SDGs*. SDGs Indonesia. <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>
- Kulikauskienė, K., & Liukinevičienė, L. (2020). The theoretical model of an inclusive library for people with disabilities and its practical implementation. *Izzivi prihodnosti Challenges of the Future* 5(2), 79-101. <https://doi.org/10.37886/ip.2020.005>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Rachman, R. A., Sugiana, D., & Rohanda, D. (2019). *Strategi sukses transformasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial untuk masyarakat sejahtera (studi pada perpustakaan desa gampingan gemar membaca malang)*. [Paper presentation]. Seminar Nasional MACOM III: Communication and Information Beyond Boundaries, Bandung, Indonesia. [https://www.researchgate.net/publication/338983808\\_Strategi\\_Sukses\\_Transformasi\\_Perpustakaan\\_Desa\\_Berbasis\\_Inklusi\\_Sosial\\_untuk\\_Masyarakat\\_Sejahtera\\_Studi\\_Pada\\_Perpustakaan\\_Desa\\_Gampingan\\_Gemar\\_Membaca\\_Malang](https://www.researchgate.net/publication/338983808_Strategi_Sukses_Transformasi_Perpustakaan_Desa_Berbasis_Inklusi_Sosial_untuk_Masyarakat_Sejahtera_Studi_Pada_Perpustakaan_Desa_Gampingan_Gemar_Membaca_Malang)
- Ranganathan S R. (1957). *The five laws of library science* (2nd ed). Asia Publishing House
- Stillwell, C. (2016). The public library as institutional capital: towards measures for addressing social inclusion and combating poverty. *Information Development*, 32(1), 44–59. <https://doi.org/10.1177/0266666914525063>
- Sustainable Development Goals. (2017). *Apa itu SDGs*. Sustainable Development Goals. <https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu>
- Utami, D., & Prasetyo, W. D. (2019). Perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. *Visi Pustaka*, 21(1), 31-38. <https://doi.org/10.37014/visipustaka.v21i1.74>
- Wahler, E. A., Provence, M. A., Williams, M. A. (2019). The changing role of libraries: how social workers can help. *Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services*, 101(1), 34-43. <https://doi.org/10.1177/1044389419850707>
- Wulansari, A., Sumaryanti, L., Syam, A. R., Laksana, S. D., & Asih, A. (2021). Dampak transformasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Publis*, 5(2), 34-48. DOI: 10.24269/pls.v5i2.4805
- Zhaochun, L. & Qunqing, H. 2008. Reaching out to vulnerable groups in China: a broad library with social inclusion. *IFLA Journal*, 34(1), 13–19. <https://doi.org/10.1177/0340035208088572>